

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal Dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik Serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung sistem administrasi yang akuntabel dan tepat waktu	Hilang/ rusak nya dokumen pegawai Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan adanya perubahan peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan keterlambatan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu
2	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal Dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik Serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Yang Akuntabel dan Transparan Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Terselenggaranya manajemen administrasi BMN yang baik dilingkungan BPHN	Terlambat penyerahan kelengkapan entry data belanja modal dan belanja persediaan Kapasitas Generator Set tidak mencukupi seluruh kebutuhan listrik kantor Masih terdapat Aset lainnya berupa buku yang belum diinventarisasi

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
3	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal Dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik Serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan	terbangunnya citra positif BPHN, administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan arsip BPHN	Keterlambatan informasi terbaru mengenai BPHN sehingga belum terbangunnya citra positif BPHN; Kurang terjalin koordinasi dengan Pusat-pusat di lingkungan BPHN dalam hal kerjasama dengan instansi lain dan LSM; belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan, kearsipan dan penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.
4	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal Dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik Serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan	Terselenggaranya Layanan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Ketidakandalan Laporan Keuangan BPHN Pembayaran gaji pegawai melebihi anggaran yang tersedia Perbedaan antara nominal tagihan pembayaran untuk pihak ketiga yang tertera di dokumen dengan aplikasi Keterlambatan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Pusat atau Bagian untuk penggunaan dana UP / TUP Perbedaan antara akun yang seharusnya digunakan dengan yang diinput pada aplikasi
5	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal Dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik Serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan	Tersusunnya dokumen pelaksanaan RB dan data informasi hasil kegiatan dan anggaran serta laporan kinerja kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu.	Website www.bphn.go.id Down Pengelolaan / pengembangan TI tidak maksimal Rekapitulasi Data (hardcopy / softcopy) tidak terpenuhi

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal Dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik Serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan RB dan Data Informasi Hasil Kegiatan dan Anggaran serta Laporan Kinerja Kegiatan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Dokumen Laporan kinerja belum lengkap
7	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal Dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik Serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan	Jumlah dokumen rencana Program dan Anggaran Yang Akuntabel dan tepat waktu	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak berbasis outcome

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat BPHN
 Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung sistem administrasi yang akurat dan tepat waktu	Hilang/ rusak nya dokumen pegawai	Kehilangan data pegawai	Sekretariat BPHN	Kelalaian	Internal	C	Pegawai tidak dapat naik pangkat, pensiun, mutasi, dll	Pegawai yang bersangkutan	SIMPEG dan melakukan scanning data	Kehilangan data pegawai
					bencana	eksternal	UC	Pegawai tidak dapat naik pangkat, pensiun, mutasi, dll	Pegawai yang bersangkutan	SIMPEG dan melakukan scanning data	Kehilangan data pegawai
		Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	Sekretariat BPHN	Load server simpeg tinggi	eksternal	UC	Keterlambatan laporan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan	Seluruh pegawai	Mengusulkan penambahan bandwidth internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan
					Pegawai terlambat menyerahkan surat tugas	eksternal	UC	Keterlambatan laporan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan	Seluruh pegawai	Membuat Surat Edaran	Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan
		adanya perubahan peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan	Peraturan baru kurang disosialisasikan	Sekretariat BPHN	kurang responsif	Internal	C	Pembinaan kepegawaian yang tidak sesuai aturan	Seluruh pegawai	Mengadakan kegiatan sosialisasi aturan hukum tentang kepegawaian	Masih adanya peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan
					kurang koordinasi	eksternal	UC	Pembinaan kepegawaian yang tidak sesuai aturan	Seluruh pegawai	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait	Masih adanya peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan
		keterlambatan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu	Penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu terlambat	Sekretariat BPHN	Kurangnya koordinasi antar Tim Penilai	Internal	C	Pejabat fungsional tertentu tidak dapat naik pangkat/jabatan tepat waktu	Pejabat fungsional tertentu yang bersangkutan	Mengadakan rapat koordinasi Tim Penilai	keterlambatan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu
2	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Yang Akuntabel dan Transparan	Terlambat penyerahan kelengkapan entry data belanja modal dan belanja persediaan	Laporan BMN tidak dapat dilanjutkan, karena data yang akan di entri belum diterima	Sekretariat BPHN	Data yang akan diinput/dientry belum diterima dari bagian keuangan (sub Perbendaharaan)	Internal	C	Tidak bisa melakukan rekon internal dengan bagian keuangan (sub AKLAP)	BPHN dan Kementerian	Rapat koordinasi	Tidak bisa melakukan pengkodean barang maupun pendistribusian barang
3	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kapasitas Generator Set tidak mencukupi seluruh kebutuhan listrik kantor	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	Sekretariat BPHN	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	Internal	C	Kinerja pegawai tidak optimal	BPHN	Pemeliharaan	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik
4	Terselenggaranya manajemen administrasi BMN yang baik dilingkungan BPHN	Masih terdapat Aset lainnya berupa buku yang belum diinventarisasi	Penghapusan BMN tidak dapat dilakukan karena belum dapat melakukan PSP	Sekretariat BPHN	Data buku belum terinventarisir	Internal	C	Tidak dapat melakukan PSP	BPHN dan Kementerian	Rapat koordinasi	Tidak bisa melakukan pengkodean Buku

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
5	terbangunnya citra positif BPHN, administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan arsip BPHN	<p>Keterlambatan informasi terbaru mengenai BPHN sehingga belum terbangunnya citra positif BPHN;</p> <p>Kurang terjalin koordinasi dengan Pusat-pusat di lingkungan BPHN dalam hal kerjasama dengan instansi lain dan LSM; belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan, kearsipan dan penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.</p>	<p>-Laporan kegiatan kehumasan ke Setjen tidak lengkap</p> <p>- Sulit memetakan kerjasama dengan instansi lain</p>	Sekretariat BPHN	Tidak terjalin koordinasi dengan Pusat-pusat di lingkungan BPHN dalam hal kerjasama dengan instansi lain dan LSM; belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan, kearsipan dan penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.	Internal	C	Kinerja tidak tercapai	Humas : masyarakat KS : Setjen/ KL TU : BPHN dan L	Penyampaian nota dina	Laporan kegiatan kehumasan ke Setjen tidak lengkap
		<p>Permasalahan umum: Kurangnya SDM yang berkualitas.</p> <p>Permasalahan khusus : Humas : Kurangnya peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, tumpang tindih fungsi Humas di BPHN dan kurang koordinasinya antar pusat di BPHN dalam melaksanakan kegiatan yang terkait kerjasama. TU : Kurangnya peralatan yang mendukung penataan arsip yang berbasis IT</p>	<p>(Humas : pelaksanaan kehumasan tidak optimal karena kurang koordinasi antar kontributor berita (Kerjasama : pelaksanaan kerja sama tidak tertata dengan baik, cenderung jalan masing-masing, sehingga menyulitkan dalam penyusunan laporan ke setjen. TU; Kehilangan dokumen/surat yang diperlukan karena tercecer atau terselip ditumpukan dokumen lain; kesulitan atau tidak ditemukannya pencarian kembali surat/dokumen yang diperlukan</p>		<p>Humas; tumpang tindih fungsi humas di BPHN karena tidak ada PPID yaitu pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Kerjasama : tidak ada kebijakan satu pintu dalam pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain. TU : kurangnya jumlah SDM dan fasilitas yang ada</p>			<p>Humas : kurang maksimal nya informasi kegiatan BPHN di masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan BPHN. KS : kerjasama berjalan masing-masing tanpa koordinasi sehingga sulit memetakan kerjasama ke depan. TU : terlambatnya penyampaian surat penting</p>			

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
6	Terselenggaranya Layanan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Ketidakandalan Laporan Keuangan BPHN	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak memperoleh opini WTP	Sekretariat BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM	Data dukung yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak akuntabel	Internal dan Eksternal	C	Penurunan Tunjangan Kinerja	BPHN dan Kementerian	Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan tingkat Kementerian Hukum dan HAM (Belum cukup memadai)	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak memperoleh opini WTP
			Kesalahan pimpinan dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang didasarkan	Sekretariat BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM	Pengungkapan Laporan Keuangan yang kurang memadai	Internal dan Eksternal	C	Kinerja tidak tercapai	BPHN dan Kementerian	Koordinasi dan Komunikasi (Belum cukup memadai)	
		Pembayaran gaji pegawai melebihi anggaran yang tersedia	Penyusunan perencanaan anggaran belanja pegawai didasarkan pada GPP	Sekretariat BPHN	Kondisi riil akan terjadi kenaikan pangkat, perpindahan JFT belum dihitung	Internal/ Eksternal	C	Pembayaran gaji pegawai tidak mencukupi untuk 12 bulan	BPHN dan Kementerian	Optimalisasi sisa hasil kegiatan	Penyusunan perencanaan anggaran belanja pegawai didasarkan pada GPP
		Perbedaan antara nominal tagihan pembayaran untuk pihak ketiga yang tertera di dokumen dengan aplikasi	Terjadi perbedaan sisa pagu	Sekretariat BPHN	Kesalahan penginputan nominal lebih/kurang pada aplikasi	Internal	C	kekurangan/kelebihan pembayaran untuk pihak ketiga	BPHN dan Pihak Ketiga	SK Pengelola Keuangan	Terjadi perbedaan sisa pagu
		Keterlambatan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Pusat atau Bagian untuk penggunaan dana UP / TUP	Keterlambatan <i>revolving</i> penggunaan Uang Persediaan	Sekretariat BPHN	Pengguna anggaran terlambat dalam menyelesaikan pertanggungjawaban yang digunakan untuk kegiatan	Internal	C	Rendahnya penyerapan anggaran	BPHN	Ketepatan waktu pengguna anggaran dalam penyelesaian pertanggungjawaban	Minimnya ketersediaan Uang Persediaan
		Perbedaan antara akun yang seharusnya digunakan dengan yang diinput pada aplikasi	Terjadi penggunaan akun yang telah digunakan dengan akun yang tersisa	Sekretariat BPHN	Kesalahan penginputan akun pada aplikasi	Internal	C	Akun yang seharusnya belum digunakan sudah terpakai untuk akun lain dan sisa pagu tidak mencukupi	BPHN	Kecermatan dalam penginputan akun pada aplikasi	Terjadi perbedaan nilai pada akun yang tersisa
7	Tersusunnya dokumen pelaksanaan RB dan data informasi hasil kegiatan dan anggaran serta laporan kinerja kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu.	Website www.bphn.go.id Down	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	Sekretariat BPHN	Provider	External	UC	1. Pegawai tidak dapat mengakses Mail Bphn.go.id 2. Internal Kemenkumham dan masyarakat luas tidak dapat memberikan masukan dan menerima Informasi hukum melalui website Bphn.go.id	BPHN, Kementerian dan Masyarakat luas	1. Laporan Service Level Aggrement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup yang ada harus selalu kontinyu	Monitoring secara kontinyu kurang
	Pengelolaan / pengembangan TI tidak maksimal	Pemanfaatan penggunaan system teknologi informasi thd kegiatan tdk banyak	Sekretariat BPHN	System TI tidak Update Kebijakan terhadap koordinasi TI	Internal	C	Lambatnya pengelolaan kegiatan yang berbasis TI	BPHN, Kementerian dan Masyarakat luas	Kebijakan pimpinan dalam penggunaan TI yang bersinergi antara kegiatan yang ada	Kepatuhan pelaksana kegiatan rendah	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
		Rekapitulasi Data (hardcopy / softcopy) tidak terpenuhi	Data/laporan hasil kegiatan tidak lengkap/tidak sesuai RKAKL	Sekretariat BPHN	Laporan Kemajuan Kegiatan berjalan /Hasil Kegiatan yg sdh di laksanakan	Internal	C	1.Tidak lengkapnya data (hardcopy / softcopy) hasil kegiatan BPHN pada tahun kegiatan maupun tahun yang sudah berjalan. 2. Kurangnya data (hardcopy / softcopy) jika terjadi pemeriksaan baik dari internal Kemenkumham maupun intansi terkait pemeriksaan. 3. Menghambat penyusunan laporan penataan 4.Menghambat dalam pengisian/download softcopy pada layanan web bphn.go.id 5.Menghambat dalam inventarisir hardcopy laporan kegiatan	BPHN dan Kementerian	Nota Dinas Teguran	Kepatuhan Pelaksana Kegiatan kurang serius menanggapi Nota dinas
8	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan RB dan Data Informasi Hasil Kegiatan dan Anggaran serta Laporan Kinerja Kegiatan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Dokumen Pelaporan Kinerja belum lengkap	Laporan Kinerja tidak akuntabel	Sekretariat BPHN	data pelaporan dari setiap pusat tidak terinci	Internal	C	Penilaian SAKIP menjadi rendah	BPHN dan Kementerian	permenpan	Dokumen pelaporan kinerja belum lengkap
9	Jumlah dokumen rencana Program dan Anggaran Yang Akuntabel dan tepat waktu	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak berbasis outcome	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	Sekretariat BPHN	Orientasi penyerapan anggaran	Internal	C	Kinerja tidak tercapai	BPHN dan Kementerian	(belum ada ?)	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan
			Perubahan kebijakan penyusunan rencana anggaran	Sekretariat BPHN	Berkurangnya nilai pagu alokasi	Eksternal	UC	Penyesuaian kinerja/outcome	BPHN dan Kementerian	ABT dan APBN-P	Perubahan kebijakan penyusunan rencana anggaran

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Kehilangan data pegawai	Moderat	3	Pegawai yang bersangkutan	5	15	Kuning
2	Kehilangan data pegawai	Sangat kecil	1	Pegawai yang bersangkutan	5	5	Kuning
3	Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk	Moderat	3	Seluruh pegawai	5	15	Kuning
4	Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk	Moderat	3	Seluruh pegawai	5	15	Kuning
5	Masih adanya peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan	Moderat	3	Seluruh pegawai	5	15	Kuning
6	Masih adanya peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan	Moderat	3	Seluruh pegawai	5	15	Kuning
7	keterlambatan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu	Moderat	3	Pejabat fungsional tertentu yang bersangkutan	5	15	Kuning
8	Laporan BMN tidak dapat diproses karena data tidak dapat di input	Pasti	4	Kementerian	5	20	Merah
9	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana ketika terjadi pemadaman dari pihak penyedia listrik	Pasti	5	BPHN	5	25	Merah
10	Penghapusan BMN tidak dapat dilakukan karena belum dapat melakukan PSP	Pasti	5	Kementerian	5	25	Merah

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
11	Laporan kegiatan kehumasan ke Setjen tidak lengkap	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
12	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak memperoleh opini WTP	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
13	Kesalahan pimpinan dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang didasarkan pada Laporan Keuangan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
14	Penyusunan perencanaan anggaran belanja pegawai didasarkan pada GPP	Moderat	3	BPHN dan Kementerian	5	15	Kuning
15	Terjadi perbedaan sisa pagu	Moderat	3	BPHN	2	6	Kuning
16	Minimnya ketersediaan Uang Persediaan	Pasti	5	BPHN	2	10	Merah
17	Terjadi perbedaan nilai pada akun yang tersisa	Pasti	2	BPHN	2	4	Kuning
18	Monitoring secara kontinyu kurang	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
19	Kepatuhan pelaksana kegiatan rendah	Hampir Pasti	4	Unit Es 1	4	16	Merah
20	Kepatuhan Pelaksana Kegiatan kurang serius menanggapi Nota dinas	Hampir Pasti	4	Unit Es 1	4	16	Merah
21	Dokumen pelaporan kinerja belum lengkap	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
22	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
22	Perubahan kebijakan penyusunan rencana anggaran	Pasti	5	Kementerian	5	25	Merah

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Kehilangan data pegawai	15	2	10	Kelalaian	5
2	Kehilangan data pegawai	5	2	10	bencana	5
3	Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan	15	2	10	Load server simpeg tinggi	5
4	Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan	15	2	10	Pegawai terlambat menyerahkan surat tugas	5
5	Masih adanya peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan	15	2	10	kurang responsif	5
6	Masih adanya peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan	15	2	10	kurang koordinasi	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
7	keterlambatan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu	15	2	10	Kurangnya koordinasi antar Tim Penilai	5
8	Tidak bisa melakukan pengkodean barang maupun pendistribusian barang	20	1	10	Data yang akan diinput/dientry belum diterima dari bagian keuangan (sub Perbendaharaan)	5
9	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	25	1	15	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	10
10	Penghapusan BMN tidak dapat dilakukan karena belum dapat melakukan PSP	25	1	15	Data buku belum terinventarisir	10
11	Laporan kegiatan kehumasan ke Setjen tidak lengkap	15	2	10	Tidak terjalin koordinasi dengan Pusat-pusat di lingkungan BPHN dalam hal kerjasama dengan instansi lain dan LSM; belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan, kearsipan dan penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
12	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak	15	1	10	Data dukung yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak akuntabel	5
13	Kesalahan pimpinan dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang didasarkan pada Laporan Keuangan	15	2	10	Pengungkapan Laporan Keuangan yang kurang memadai	5
14	Penyusunan perencanaan anggaran belanja pegawai didasarkan pada GPP	15	1	10	Kondisi riil akan terjadi kenaikan pangkat, perpindahan JFT belum dihitung	5
15	Terjadi perbedaan sisa pagu	6	3	5	Kesalahan penginputan nominal lebih/kurang pada aplikasi	1
16	Minimnya ketersediaan Uang Persediaan	10	1	8	Pengguna anggaran terlambat dalam menyelesaikan pertanggungjawaban yang digunakan untuk kegiatan	2
17	Terjadi perbedaan nilai pada akun yang tersisa	4	2	2	Kesalahan penginputan akun pada aplikasi	2
18	Monitoring secara kontinyu kurang	15	1	10	Provider	5
19	Kepatuhan pelaksana kegiatan rendah	16	2	15	System TI tidak Update Kebijakan terhadap koordinasi TI	1

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
20	Kepatuhan Pelaksana Kegiatan kurang serius menanggapi Nota dinas	16	3	15	Laporan Kemajuan Kegiatan berjalan /Hasil Kegiatan yg sdh di laksanakan	1
21	Dokumen pelaporan kinerja belum lengkap	15	1	10	data pelaporan dari setiap pusat tidak terinci	5
22	Dokumen rencana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	15	2	10	Orientasi penyerapan anggaran	5
23	Perubahan kebijakan penyusunan rencana anggaran	25	1	15	Berkurangnya nilai pagu alokasi	10

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Indikator Risiko		Ops Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kelalaian	5	Mengurangi Risiko	Melakukan scanning data Updating Data	Jumlah data yang di scan Jumlah data update	3	Agustus, September, Oktober	Sekretariat BPHN	-
2	bencana	5	Mengurangi Risiko	Melakukan scanning data	Jumlah data yang di scan	3	Agustus, September, Oktober	Sekretariat BPHN	-
3	Load server simpeg tinggi	5	Mengurangi Risiko	Mengusulkan penambahan <i>bandwidth</i> internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Kapasitas <i>bandwidth</i> internet	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
4	Pegawai terlambat menyerahkan surat tugas	5	Mengurangi Risiko	Menginformasikan kepada TU masing- masing	Laporan surat tugas	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
5	kurang responsif	5	Mengurangi Risiko	Meningkatkan responsif terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Monitoring peraturan / kebijakan	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	kurang koordinasi	5	Mengurangi Risiko	Meningkatkan koordinasi terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Koordinasi dengan instansi terkait	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
7	Kurangnya koordinasi antar Tim Penilai	5	Mengurangi Risiko	Meningkatkan koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	-
8	Data yang akan diinput/dientry belum diterima dari bagian keuangan (sub Perbendaharaan)	5	Mengurangi Risiko	Rapat koordinasi	Rapat Koordinasi	2	Juli & desember	Sekretariat BPHN	-
9	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	10	Mengurangi Risiko	Mengusulkan anggaran untuk generator set baru	Usulan anggaran	1	Oktober	Sekretariat BPHN	-
10	Data buku belum terinventarisir	10	Mengurangi Risiko	Rapat koordinasi	Kerjasama dengan pihak ke tiga	2	Juli & desember	Sekretariat BPHN	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Tidak terjalin koordinasi dengan Pusat-pusat di lingkungan BPHN dalam hal kerjasama dengan instansi lain dan LSM; belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan, kearsipan dan penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.	5	Mengurangi Risiko	1) Pembentukan tim yang melibatkan perwakilan pusat sebagai kontributor berita (PIC). 2) Membuat SOP pelaksanaan KS di BPHN 3) Memanfaatkan siswa PKL/mahasiswa magang untuk membantu penomoran dan pengarsipan surat	Humas : SK. KS : SOP TU : permintaan siswa PKL/Mahasiswa magang	2	Maret	Sekretariat BPHN	-
12	Data dukung yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak akuntabel	5	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Peningkatan kualitas rekonsiliasi data Laporan Keuangan	Berita Acara Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	2	Februari dan Juni	Sekretariat BPHN	-
13	Pengungkapan Laporan Keuangan yang kurang memadai	5	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Peningkatan kualitas reuiu Laporan Keuangan	Catatan Hasil Reuiu	2	Februari dan Juni	Sekretariat BPHN	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Kondisi riil akan terjadi kenaikan pangkat, perpindahan JFT belum dihitung	5	Menggeser Pagu Anggaran	Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pegawai dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan	Pelayanan pembayaran gaji pegawai dapat terpenuhi untuk 12 bulan	1	Juli s.d Desember	Sekretariat BPHN	-
15	Kesalahan penginputan nominal lebih/kurang pada aplikasi	1	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Evaluasi kegiatan Pengelola Keuangan secara rutin	Laporan Hasil Evaluasi	4	Maret, Juni, September, Desember	Sekretariat BPHN	-
16	Pengguna anggaran terlambat dalam menyelesaikan pertanggungjawaban yang digunakan untuk kegiatan	2	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Rapat koordinasi internal dengan Kasub TU dan/atau pelaksana kegiatan	Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing pusat dan bagian	1	Februari s.d Desember	Sekretariat BPHN	-
17	Kesalahan penginputan akun pada aplikasi	2	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Evaluasi kegiatan Pengelola Keuangan secara rutin	Nilai realisasi penyerapan anggaran untuk setiap akun	2	Februari s.d Desember	Sekretariat BPHN	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Provider	5	Mengurangi Risiko Mengalihkan Risiko	1. Laporan Service Level Agreement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup	Penyusunan Laporan tiap triwulan	2	September, Desember	Sekretariat BPHN	-
19	System TI tidak Update Kebijakan terhadap koordinasi TI	1	Mengurangi Risiko	Kebijakan pimpinan dalam penggunaan TI yang bersinergi antara kegiatan yang ada	Standar Operating Prosedur	1	Oktober	Sekretariat BPHN	-
20	Laporan Kemajuan Kegiatan berjalan /Hasil Kegiatan yg sdh di laksanakan	1	Mengurangi Risiko	Nota Dinas Teguran	Standar Operating Prosedur	1	Oktober	Sekretariat BPHN	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	data pelaporan dari setiap pusat tidak terinci	5	Mengurangi Risiko	Internalisasi permenpan tentang dan bintek penyusunan/pennyajian laporan	Dokumen pelaksanaan internalisasi dan bintek	2	Oktober-desember	Sekretariat BPHN	-
22	Orientasi penyerapan anggaran	5	Mengurangi Risiko	Penyusunan anggaran berbasis kinerja	Jumlah dokumen penyusunan anggaran	2	Februari, Agustus	Sekretariat BPHN	-
23	Berkurangnya nilai pagu alokasi	10	Mengurangi Risiko	Mengusulkan anggaran untuk kegiatan yang belum terpenuhi	Usulan anggaran pelaksanaan kegiatan	1	Oktober	Sekretariat BPHN	-

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Melakukan scanning data Updating Data	Jumlah data yang di scan Jumlah data update	3	1	33,3	Kelalaian	5,0	1,7	33,3	6,7	
2	Melakukan scanning data	Jumlah data yang di scan	3	1	33,3	bencana	5,0	2,5	50,0	5,0	
3	Mengusulkan penambahan bandwidth internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Kapasitas bandwidth internet	12	8	66,7	Load server simpeg tinggi	5,0	3,3	66,7	3,3	
4	Menginformasikan kepada TU masing-masing	Laporan surat tugas	12	8	66,7	Pegawai terlambat menyerahkan surat tugas	5,0	3,3	66,7	3,3	
5	Meningkatkan responsif terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Monitoring peraturan / kebijakan	12	8	66,7	kurang responsif	5,0	3,3	66,7	3,3	
6	Meningkatkan koordinasi terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Koordinasi dengan instansi terkait	12	8	66,7	kurang koordinasi	5,0	3,3	66,7	3,3	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
7	Meningkatkan koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait	12	8	66,7	Kurangnya koordinasi antar Tim Penilai	5,0	2,9	58,3	4,2	
8	Rapat koordinasi	Rapat Koordinasi	2	1	50,0	Data yang akan diinput/dientry belum diterima dari bagian keuangan (sub Perbendaharaan)	5,0	3,8	75,0	2,5	
9	Mengusulkan anggaran untuk generator set baru	Usulan anggaran	1	1	100,0	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	10,0	7,5	75,0	3,8	
10	Rapat koordinasi	Kerjasama dengan pihak ke tiga	2	1	50,0	Data buku belum terinventarisir	10,0	5,0	50,0	7,5	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
11	<p>1) Pembentukan tim yang melibatkan perwakilan pusat sebagai kontributor berita (PIC).</p> <p>2) Membuat SOP pelaksanaan KS di BPHN</p> <p>3) Memanfaatkan siswa PKL/mahasiswa magang untuk membantu penomoran dan pengarsipan surat</p>	Humas : SK. KS : SOP TU : permintaan siswa PKL/Mahasiswa magang	2	2	100,0	Tidak terjalin koordinasi dengan Pusat-pusat di lingkungan BPHN dalam hal kerjasama dengan instansi lain dan LSM; belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan, kearsipan dan penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.	5,0	5,0	100,0	0,0	
12	Peningkatan kualitas rekonsiliasi data Laporan Keuangan	Berita Acara Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	2	2	100,0	Data dukung yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak akuntabel	5,0	5,0	100,0	0,0	
13	Peningkatan kualitas reviu Laporan Keuangan	Catatan Hasil Reviu	2	2	100,0	Pengungkapan Laporan Keuangan	5,0	5,0	100,0	0,0	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
14	Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pegawai dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan	Pelayanan pembayaran gaji pegawai dapat terpenuhi untuk 12 bulan	1	1	100,0	Kondisi riil akan terjadi kenaikan pangkat, perpindahan JFT belum dihitung	5,0	5,0	100,0	0,0	
15	Evaluasi kegiatan Pengelola Keuangan secara rutin	Laporan Hasil Evaluasi	4	4	100,0	Kesalahan penginputan nominal lebih/kurang pada aplikasi	1,0	1,0	100,0	0,0	
16	Rapat koordinasi internal dengan Kasub TU dan/atau pelaksana kegiatan	Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing pusat dan bagian	1	1	100,0	Pengguna anggaran terlambat dalam menyelesaikan pertanggungjawaban yang digunakan untuk kegiatan	2,0	2,0	100,0	0,0	
17	Evaluasi kegiatan Pengelola Keuangan secara rutin	Nilai realisasi penyerapan anggaran untuk setiap akun	2	2	100,0	Kesalahan penginputan akun pada aplikasi	2,0	2,0	100,0	0,0	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
18	1. Laporan Service Level Aggrement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup yang ada harus selalu kontinyu	Penyusunan Laporan tiap triwulan	2	2	100,0	Provider	5,0	5,0	100,0	0,0	
19	Kebijakan pimpinan dalam penggunaan TI yang bersinergi antara	Standar Operating Prosedur	1	1	100,0	System TI tidak Update Kebijakan	1,0	1,0	100,0	0,0	
20	Nota Dinas Teguran	Standar Operating Prosedur	1	1	100,0	Laporan Kemajuan Kegiatan berjalan /Hasil Keegiatn yg sdh di laksanakan	1,0	1,0	100,0	0,0	
21	Internalisasi permenpan tentang dan bintek penyusunan/pennyajian laporan	Dokumen pelaksanaan internalisasi dan bintek	2	2	100,0	data pelaporan dari setiap pusat tidak terinci	5,0	5,0	100,0	0,0	
22	Penyusunan anggaran berbasis kinerja	Jumlah dokumen penyusunan anggaran	2	2	100,0	Orientasi penyerapan anggaran	5,0	5,0	100,0	0,0	
23	Mengusulkan anggaran untuk kegiatan yang belum terpenuhi	Usulan anggaran pelaksanaan kegiatan	1	1	100,0	Berkurangnya nilai pagu alokasi	10,0	10,0	100,0	0,0	